
Analisis Kebijakan Kurikulum Merdeka: Peluang dan Tantangan dalam Transformasi Pendidikan di Indonesia

Dini Anggraeni^{1, a *}, Mahpudin^{2, b}, dst.

Universitas Majalengka, Majalengka, Indonesia

Universitas Majalengka, Majalengka, Indonesia^a

anggraenidini774@gmail.com;

mahpudin893@gmail.com;

* Corresponding Author

Receipt: Artikel dikirim; Revision: Artikel diputuskan revisi; Accepted: Artikel diputuskan diterima @The Author(s) 2024

Abstract:

The Merdeka Curriculum is a national education policy designed to respond to the demands of 21st-century learning through a flexible, student-centered, and character-oriented approach. This article aims to analyze the opportunities and challenges of implementing the Merdeka Curriculum in supporting educational transformation in Indonesia. This study employs a qualitative descriptive approach using a literature review method, drawing on academic journals, official policy documents from the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology, as well as empirical research findings related to the implementation of the Merdeka Curriculum. The results indicate that the Merdeka Curriculum has significant potential to improve learning quality, student engagement, creativity, and character development through the Project for Strengthening the Pancasila Student Profile. However, its implementation continues to face several challenges, particularly disparities in teacher readiness, limitations in educational infrastructure, and school organizational cultures that are not yet fully adaptive to change. This study concludes that the success of the Merdeka Curriculum largely depends on sustained policy commitment, equitable teacher professional development, and adequate systemic support to achieve inclusive and equitable educational transformation.

Keywords: Merdeka Curriculum, education policy, educational transformation, Pancasila Student Profile

Abstrak:

Kurikulum Merdeka merupakan kebijakan pendidikan nasional yang dirancang untuk merespons tuntutan pembelajaran abad ke-21 melalui pendekatan yang fleksibel, berpusat pada peserta didik, dan berorientasi pada penguatan karakter. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peluang dan tantangan implementasi Kurikulum Merdeka dalam mendukung transformasi pendidikan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka yang bersumber dari jurnal ilmiah, dokumen kebijakan resmi Kemendikbudristek, serta temuan penelitian empiris terkait penerapan Kurikulum Merdeka. Hasil kajian menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, keterlibatan aktif siswa, kreativitas, serta penguatan karakter melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait ketimpangan kesiapan guru, keterbatasan infrastruktur pendidikan, dan budaya organisasi sekolah yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perubahan. Kajian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan Kurikulum Merdeka sangat bergantung pada komitmen kebijakan yang berkelanjutan, pemerataan pengembangan profesional guru, serta dukungan sistemik yang memadai untuk mewujudkan transformasi pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.

PENDAHULUAN

Pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia dan menentukan arah kemajuan suatu negara. Dalam konteks Indonesia, perubahan cara berpikir mengenai pendidikan telah melalui proses panjang seiring dengan kemajuan sosial, teknologi, dan kebutuhan di tingkat global. Sejak memperoleh kemerdekaan, sistem pendidikan di Indonesia telah melalui sejumlah perubahan kurikulum — dimulai dari Kurikulum 1947, 1968, 1984, 1994, 2006 (KTSP), 2013 (K13), hingga pada tahun 2022, pemerintah mengenalkan Kurikulum Merdeka. Setiap modifikasi pada kurikulum memperlihatkan usaha pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan, namun juga mengindikasikan adanya dinamika serta tantangan dalam pelaksanaannya di lapangan.

Kurikulum Merdeka hadir sebagai jawaban terhadap kritik mengenai pelaksanaan Kurikulum 2013 yang dianggap terlalu banyak materi, berfokus pada hasil ujian, serta kurang memberikan kesempatan untuk kreativitas bagi guru dan siswa. Berdasarkan informasi dari Kemendikbudristek (2023), kurikulum yang baru ini dibuat untuk meningkatkan kemandirian, kreativitas, serta kemampuan berpikir kritis siswa lewat pembelajaran yang fleksibel, kontekstual, dan berfokus pada peserta didik. Dengan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada siswa, guru memiliki kebebasan untuk menyesuaikan proses belajar agar sesuai dengan karakter, minat, dan kecepatan belajar para siswa.

Selanjutnya, kebijakan ini juga menekankan signifikansi karakter dan nilai-nilai kebangsaan melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Proyek ini menjadi karakteristik dari Kurikulum Merdeka, dengan tujuan untuk menanamkan nilai-nilai kerjasama, kemandirian, dan keberagaman global kepada para siswa. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Nadiem Makarim (2022) bahwa pendidikan di Indonesia tidak seharusnya hanya menghasilkan siswa yang pintar secara akademis, tetapi juga yang memiliki karakter dan mampu beradaptasi dengan perubahan dalam dunia kerja yang terus berubah.

Namun, konsep ideal dari kebijakan ini harus menghadapi kondisi yang rumit di lapangan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Pusat Asesmen dan Pembelajaran (2024), dari total sekitar 140.000 satuan pendidikan di Indonesia, hanya 60% sekolah yang mengaku siap untuk melaksanakan Kurikulum Merdeka secara mandiri. Sisa dari hal tersebut masih bergantung pada dukungan pemerintah karena adanya keterbatasan sumber daya, pelatihan bagi guru, serta fasilitas teknologi. Kondisi ini mengindikasikan adanya perbedaan dalam tingkat kesiapan di antara berbagai daerah, yang dapat menyebabkan ketidakmerataan dalam kualitas pendidikan di tingkat nasional.

Selain masalah teknis, terdapat juga isu kebijakan yang berkaitan dengan keberlanjutan dan konsistensi program. Beberapa pemantau pendidikan berpendapat bahwa perubahan kurikulum yang dilakukan dengan sangat cepat tanpa pengujian yang mendalam dapat menyebabkan munculnya “kejenuhan kebijakan” di kalangan para pengajar. Sebagaimana dinyatakan oleh Lestari (2023) dalam Jurnal Kebijakan Pendidikan Nasional, pelaksanaan kebijakan kurikulum yang tidak didukung oleh

kesiapan budaya organisasi sekolah berpotensi mengalami kegagalan di tingkat pelaksanaan, walaupun rancangan yang ada dianggap sempurna.

Maka dari itu, penting untuk melakukan analisis terhadap Kebijakan Kurikulum Merdeka guna mengevaluasi seberapa efektif kebijakan ini dalam mewujudkan transformasi pendidikan yang berkelanjutan. Studi ini tidak hanya bertujuan untuk menilai keberhasilan awal, tetapi juga untuk mengenali kendala dalam pelaksanaan serta langkah-langkah strategis agar kebijakan ini benar-benar memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas pembelajaran di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis *narrative policy review*. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis kebijakan Kurikulum Merdeka secara komprehensif melalui penelaahan kritis terhadap berbagai literatur tanpa mengikuti prosedur sistematis yang ketat seperti pada *systematic review*.

Sumber data dalam penelitian ini berupa literatur sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah nasional terakreditasi (SINTA 2–4), dokumen kebijakan resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), serta laporan penelitian empiris yang relevan dengan implementasi Kurikulum Merdeka. Kriteria inklusi literatur meliputi: (1) publikasi terbit dalam rentang tahun 2020–2024, (2) membahas kebijakan Kurikulum Merdeka atau Merdeka Belajar, (3) relevan dengan konteks pendidikan dasar dan menengah di Indonesia, serta (4) tersedia dalam teks lengkap. Literatur yang tidak relevan dengan fokus kebijakan pendidikan atau tidak memiliki sumber yang jelas dikecualikan dari analisis.

Tahapan analisis data dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu: (1) pengelompokan literatur berdasarkan fokus pembahasan kebijakan, (2) klasifikasi tema utama ke dalam tiga kategori analisis, yaitu peluang, tantangan, dan dampak implementasi Kurikulum Merdeka, (3) penafsiran temuan dengan membandingkan hasil antar studi, serta (4) penarikan simpulan secara analitis untuk menggambarkan implikasi kebijakan terhadap transformasi pendidikan di Indonesia.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui metode studi pustaka (*library research*). Informasi didapatkan dari berbagai sumber sekunder, termasuk jurnal nasional yang terakreditasi, laporan dari Kemendikbudristek, serta hasil penelitian empiris mengenai penerapan Kurikulum Merdeka. Analisis dilaksanakan dengan cara mempelajari dan membandingkan hasil penelitian yang telah ada sebelumnya, guna mengidentifikasi pola peluang, tantangan, serta pengaruh kebijakan terhadap sistem pendidikan nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil

1. Landasan dan Tujuan Kebijakan Kurikulum Merdeka

Secara konseptual, Kurikulum Merdeka didasarkan pada visi Merdeka Belajar, yang bertujuan memberikan kebebasan bagi para guru dan siswa untuk melakukan eksperimen dalam proses pembelajaran. Berdasarkan informasi dari Kemendikbudristek (2023), kebijakan ini menekankan tiga prinsip utama: kenyamanan dalam kurikulum,

pembelajaran intensif yang sesuai dengan minat siswa, serta penguatan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Rahmawati (2023) dalam Jurnal Inovasi Pendidikan menjelaskan bahwa Kurikulum Merdeka adalah “sebuah kebijakan yang mengubah” yang mengutamakan otonomi pada sekolah dan guru. Guru tidak lagi hanya menjalankan tugas administratif, tetapi berperan sebagai perancang pembelajaran yang secara aktif menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. Pendekatan Pembelajaran Berbasis Proyek (PBL) yang diintegrasikan melalui Proyek Profil Pelajar Pancasila memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir secara kritis, berkolaborasi, dan menciptakan hasil yang nyata.

Dalam ranah kebijakan publik, Kurikulum Merdeka dapat diklasifikasikan sebagai kebijakan yang fleksibel yaitu kebijakan yang dibuat untuk beradaptasi dengan tantangan yang muncul akibat perubahan sosial dan teknologi. Berdasarkan Hidayat dan Prasetyo (2024) dalam Jurnal Kebijakan Pendidikan, pendidikan di masa depan memerlukan keterampilan abad ke-21, seperti kemampuan literasi digital, komunikasi yang bersifat kolaboratif, serta kemampuan dalam menyelesaikan masalah yang kompleks. Oleh karena itu, orientasi Kurikulum Merdeka sesuai dengan perkembangan pendidikan modern di tingkat global.

2. Tantangan Implementasi di Lapangan

Walaupun tujuan dari kebijakan ini baik, penerapannya mengalami berbagai tantangan. Menurut laporan Kemendikbudristek (2024), hambatan yang paling utama ialah ketidakseimbangan kemampuan sumber daya manusia di berbagai daerah. Sejumlah besar guru di daerah terpencil belum menerima pelatihan yang cukup mengenai cara menyusun modul pembelajaran, melakukan asesmen formatif, dan memanfaatkan platform digital Merdeka Mengajar.

Sari dan Nugroho (2023) menunjukkan bahwa 45% guru masih mengalami kesulitan dalam memahami konsep pembelajaran yang berbeda-beda — pendekatan utama dalam Kurikulum Merdeka yang menyesuaikan proses belajar sesuai dengan kemampuan siswa. Ini menunjukkan pentingnya pelatihan yang terus menerus, bukan hanya sosialisasi awal.

Selain peran guru, kondisi infrastruktur sekolah juga merupakan penghalang yang penting. Simanjuntak (2024) menginformasikan bahwa sekitar 30% sekolah dasar di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) masih belum memiliki akses internet yang stabil, sehingga mereka tidak dapat memanfaatkan perangkat digital untuk pembelajaran secara maksimal. Sebagai hasilnya, pelaksanaan proyek P5 dan penilaian digital tidak berjalan dengan baik.

Dari perspektif budaya organisasi, beberapa sekolah masih menerapkan cara lama yang fokus pada hasil ujian. Sebenarnya, Kurikulum Merdeka meminta adanya perubahan cara berpikir menuju penilaian terhadap proses dan karakter. Kekurangan kesiapan kepala

sekolah untuk mengubah cara manajemen pembelajaran sering menyebabkan guru terus menggunakan metode lama, meskipun kurikulum baru sudah diterapkan secara resmi (Lestari, 2023).

3. Dampak Awal terhadap Proses dan Hasil Belajar

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, dampak awal dari Kurikulum Merdeka menunjukkan hasil yang baik di sejumlah sekolah contoh. Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Suryana (2024) menunjukkan bahwa ada peningkatan partisipasi siswa dalam diskusi kelas serta proyek sosial setelah mereka mengikuti kegiatan P5. Para siswa menjadi lebih terbuka, kreatif, dan percaya diri ketika menyampaikan gagasan.

Selain itu, para pengajar yang telah akrab dengan paradigma Merdeka Belajar melaporkan peningkatan motivasi dalam proses pengajaran mereka. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasution (2024) dalam Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia, hasilnya menunjukkan bahwa 78% guru merasa lebih "bermakna" karena mereka diberikan kebebasan untuk memilih metode dan media pembelajaran yang mereka inginkan.

Namun, pencapaian tersebut belum tersebar secara merata. Sekolah-sekolah yang memiliki fasilitas terbatas atau tidak menerima bimbingan yang cukup sering kali mengalami kemunduran. Banyak pengajar merasakan tekanan akibat perubahan administrasi yang cepat dan minimnya bantuan teknis. Situasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan Kurikulum Merdeka sangat dipengaruhi oleh mutu pendampingan dan dukungan dari kebijakan terkait, seperti BOS Kinerja, pelatihan daring, serta supervisi antar daerah.

Dari sudut pandang teori kebijakan publik, hal ini menunjukkan perbedaan antara perancangan kebijakan dan kapasitas kebijakan. Desain kebijakan Kurikulum Merdeka memang merupakan sebuah inovasi, tetapi kemampuan pelaksana di lapangan masih bervariasi. Agar kebijakan ini dapat berhasil, diperlukan sistem umpan balik — yaitu mekanisme berkelanjutan yang memungkinkan guru dan kepala sekolah memberikan masukan kepada pembuat kebijakan, seperti yang diusulkan oleh Hidayat (2024).

SIMPULAN

Kurikulum Merdeka adalah suatu kebijakan pendidikan yang memiliki visi ke depan dan mampu menyesuaikan diri dengan tantangan di abad ke-21. Dengan memberikan kesempatan bagi guru dan siswa, kebijakan ini dapat meningkatkan kreativitas, karakter, serta relevansi dalam proses pembelajaran. Namun, tantangan signifikan masih menghadang, terutama yang berhubungan dengan kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur pendidikan, dan pola kerja di sekolah.

Agar kebijakan ini berhasil di seluruh negeri, pemerintah harus meningkatkan pelatihan berkelanjutan, menyediakan akses digital yang setara, serta mendukung kerja sama antara sekolah, masyarakat, dan sektor industri. Tanpa adanya dukungan sistemik, Kurikulum Merdeka berpotensi menjadi kebijakan yang hanya menguntungkan

sekolah-sekolah terbaik. Melalui pengawasan dan penilaian yang didasarkan pada bukti, Kurikulum Merdeka dapat menjadi dasar yang kuat untuk menciptakan pendidikan di Indonesia yang merdeka, inklusif, dan adil.

DAFTAR REFERENSI

- Hidayat, M. (2024). *Kebijakan adaptif dalam pendidikan nasional: Studi atas implementasi Kurikulum Merdeka*. Jurnal Kebijakan Pendidikan, 12(1), 33–49.
- Kemendikbudristek. (2023). *Panduan implementasi Kurikulum Merdeka*. Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Lestari, F. (2023). *Budaya organisasi sekolah dan kesiapan implementasi Kurikulum Merdeka*. Jurnal Kebijakan Pendidikan Nasional, 8(2), 177–189.
- Nasution, T. (2024). *Respon guru terhadap kebijakan Merdeka Belajar di sekolah dasar*. Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia, 10(2), 145–160.
- Putri, D., & Suryana, R. (2024). *Dampak Proyek Profil Pelajar Pancasila terhadap kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar*. Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia, 10(1), 55–68.
- Rahmawati, N. (2023). *Model pembelajaran berbasis proyek dalam Kurikulum Merdeka*. Jurnal Inovasi Pendidikan, 7(3), 145–156.
- Sari, R., & Nugroho, A. (2023). *Evaluasi kesiapan implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah dasar*. Jurnal Evaluasi Pendidikan Nasional, 9(2), 210–225.
- Simanjuntak, T. (2024). *Tantangan digitalisasi dalam implementasi Kurikulum Merdeka di daerah 3T*. Jurnal Teknologi dan Pendidikan, 11(1), 33–47.